

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali. M., 2013, *Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Anwar. S., 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arief. B.N., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet ke-2 Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita. R., 2013, *Buku I Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Budiardjo. M., 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Chazawi. A., 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Edwin. S., 1983, *White Collar Crime: The Uncut Version*, Yale University Press, New Haven.
- Farid. A.Z.A., -----, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Fuady. M., 2011, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Kencana, Jakarta.
- Greenberg. T.S., -----, 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank & UNODC, Washington DC.
- Hadiati. H., 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Hamzah. A., 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumatmadja. M., 1986, *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.

- Kholis. E. L., 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Solusi* Publishing, Jakarta.
- Kusumah. M.W., 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jaya. N.S.O., 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Lamintang. P.A.F., -----, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, SinarGrafika, Jakarta.
- Marzuki. P.M., 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong. L.J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi. B.A, 2017, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurdjana. I.G.M., 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Panggabean. H., 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Prakoso. D., 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro. W., 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Prasetyo. ., -----., 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Raharjo. R., 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Remmelink. J., 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Puanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rosikah. C.D. -----, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim. H.H.A., -----., 2014 *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Shapiro. S.F., 1980, *Thinking About White Collar Crime: Matters of Conceptualization and Research* December, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice.
- Soeprapto. M.F.I, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto. S, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Stessen. G., -----, 2000, *A New International Law Enforcement Model*, CSICI-Cambridge University Press, USA.
- Sujana. N.,----- 2000, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Susanto. F.S., 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Sutherland dan Cressey yang disadur oleh Sudjono D, 1974, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Yanuar. P.M., 2007, *Pengambalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Yusuf. M, 2013, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

B. Laporan Penelitian

- Muntahar. T. I., 2020, “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Suarbawa. I.K, 2019, “Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret, Surakarta
- Sadeli. W. H., 2010, “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta

C. Jurnal, Artikel, dan Sumber Lain

- Darmadi. N.O.Y., “Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 02, No. 02, 2013.

- Edwin. S, “*White-Collar Criminality, American Sociological Review*”, Vol. 5, No. 1, 1940.
- Jaya. A. M., “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cepalo*, Volume 1 Nomor 1, 2017.
- Musahib. A.R, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *E Journal Katalogis*, Vol. 3 No. 1, 2015.
- Latif. N., “Teori Hukum Sebagai Sarana Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Nugroho. N, “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Pradityo. R., “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Edaran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Tahun 1960]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 1981]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 , [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 Tahun 2001]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Tahun 2009]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Tahun 2011 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 Tahun 2022]

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B0235/E/3/1994 tertanggal 4 Maret 1994 Perihal Eksekusi Putusan Pengadilan

Surat Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas.